

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Struktur Perekonomian Berbasis Industri Namun Rentan Terhadap Krisis
 - 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Lebih Didorong Konsumsi Daripada Investasi
 - 3.3 Kondisi Infrastruktur Wilayah Kurang Memadai untuk Mendukung Logistik yang Efisien
 - 3.4 Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.5 Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Masih Bisa Ditingkatkan Untuk Mendukung Pertumbuhan
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2014

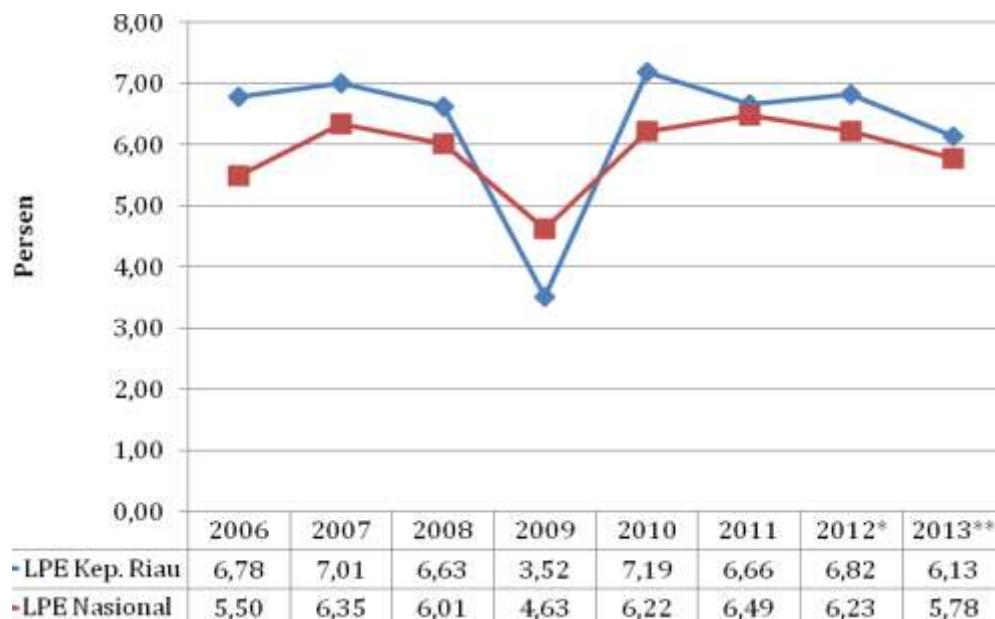
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Kinerja Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional, baik sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi maupun sebagai kawasan strategis perbatasan dengan negara tetangga. Pada tahun 2012 kontribusi Kepulauan Riau terhadap wilayah sebesar 5,73 persen, sedangkan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 1,36 persen. Peran perekonomian Kepulauan Riau sangat menonjol sebagai salah satu pusat industri nasional dengan pangsa produksi di sektor industri logam dasar mencapai 10,5 persen, sektor alat angkut dan mesin mencapai 7 persen, industri semen dan barang galian bukan logam mencapai 7,1 persen, industri barang kayu mencapai 5,2 persen, dan industri lainnya mencapai 5,6 persen.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000



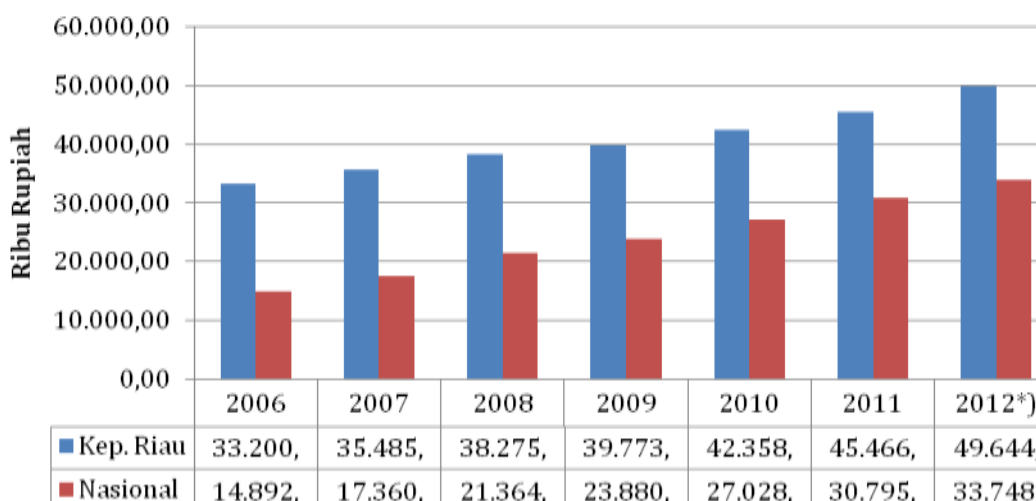
Sumber: BPS, 2013

Selama periode 2006 – 2013, secara umum perekonomian Kepulauan Riau cenderung bertumbuh lebih pesat dibanding laju pertumbuhan nasional dan wilayah. Kepulauan Riau tumbuh dengan laju rata-rata 6,34 persen, di atas laju pertumbuhan nasional sebesar 5,90 pada periode yang sama (Gambar 1). Pada tahun 2009 pelambatan pertumbuhan ekonomi daerah lebih nyata dari tingkat nasional sebagai dampak pelambatan perdagangan dunia selama krisis finansial global 2009. Namun

demikian di tahun berikutnya perekonomian daerah relatif pulih dan kembali tumbuh lebih tinggi dari laju pertumbuhan wilayah dan nasional.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat. Dalam hal ini PDRB per kapita dapat dianggap sebagai perkiraan perhitungan pendapatan masyarakat daerah. Pertumbuhan PDRB per kapita secara riil di Provinsi Kepulauan Riau rendah karena laju pertumbuhan penduduk daerah juga tinggi. Sebagian besar pertumbuhan penduduk didorong oleh migrasi. Secara nasional, tingkat pendapatan per kapita di Kepulauan Riau termasuk yang tertinggi dibandingkan daerah-daerah lain dan lebih tinggi dari nilai PDRB per kapita nasional. Jika pada tahun 2006 perbandingan PDRB per kapita Kepulauan Riau terhadap nasional sebesar 222,93 persen, pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 147,10 persen (Gambar 2).

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

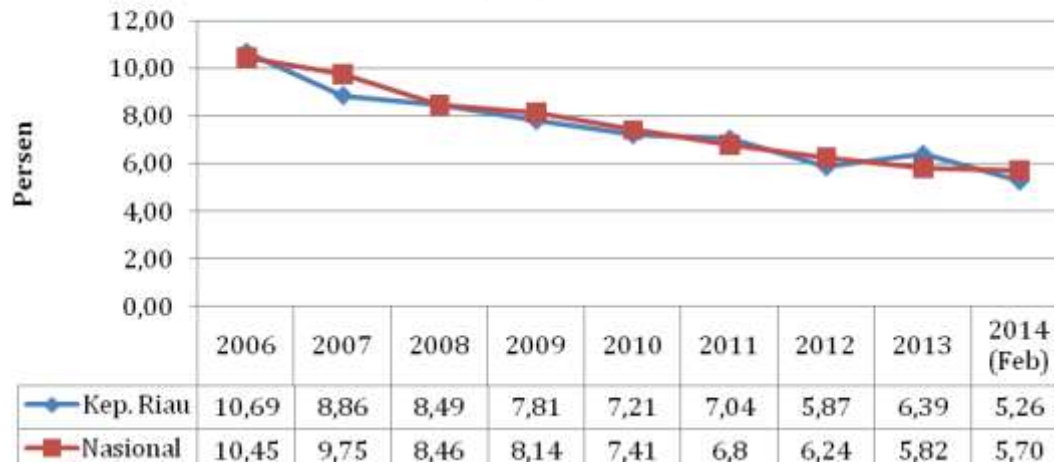


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi daerah terlihat mampu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran daerah. Secara umum tingkat pengangguran daerah hampir sama dengan tingkat pengangguran nasional dengan penurunan yang cenderung melambat (Gambar 3). Selama tahun 2006 – 2013 pengangguran di Kepulauan Riau berkurang sebesar 5,43 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun. Tingkat pengangguran yang rendah di tengah pendapatan per kapita yang rendah mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di daerah tersebut. Oleh karena itu diperlukan penelusuran lebih lanjut mengenai kualitas pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah.

Gambar 3.
Tingkat Pengangguran Terbuka

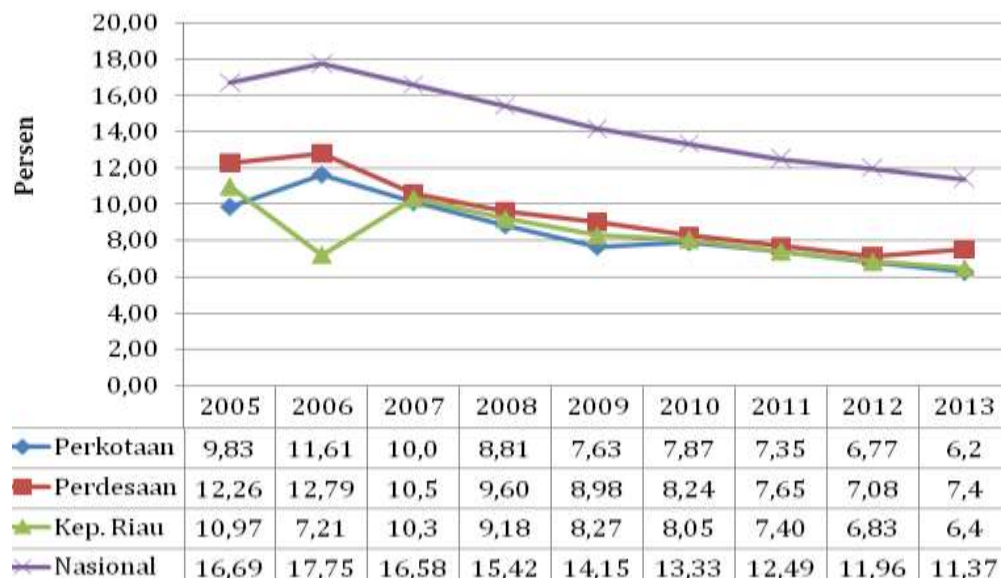


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat pengangguran pada juga diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan daerah. Persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau menurun secara konsisten selama tahun 2006-2013 khususnya di perdesaan (Gambar 4).

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

Di perkotaan, Kepulauan Riau tingkat kemiskinan sempat meningkat dibandingkan dengan di perdesaan pada tahun 2006, tetapi kemudian menurun terus hingga tahun 2013. Hal ini juga menunjukkan bahwa perekonomian daerah

perkotaan lebih merasakan dampak buruk kenaikan harga BBM pada tahun 2006. Secara umum tingkat kemiskinan tidak berbeda jauh antara di perkotaan dan di perdesaan. Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, capaian daerah relatif lebih baik. Sebagai perbandingan pada tahun 2013 persentase penduduk miskin daerah mencapai 6,46 persen, lebih rendah dari tingkat nasional 11,37 persen

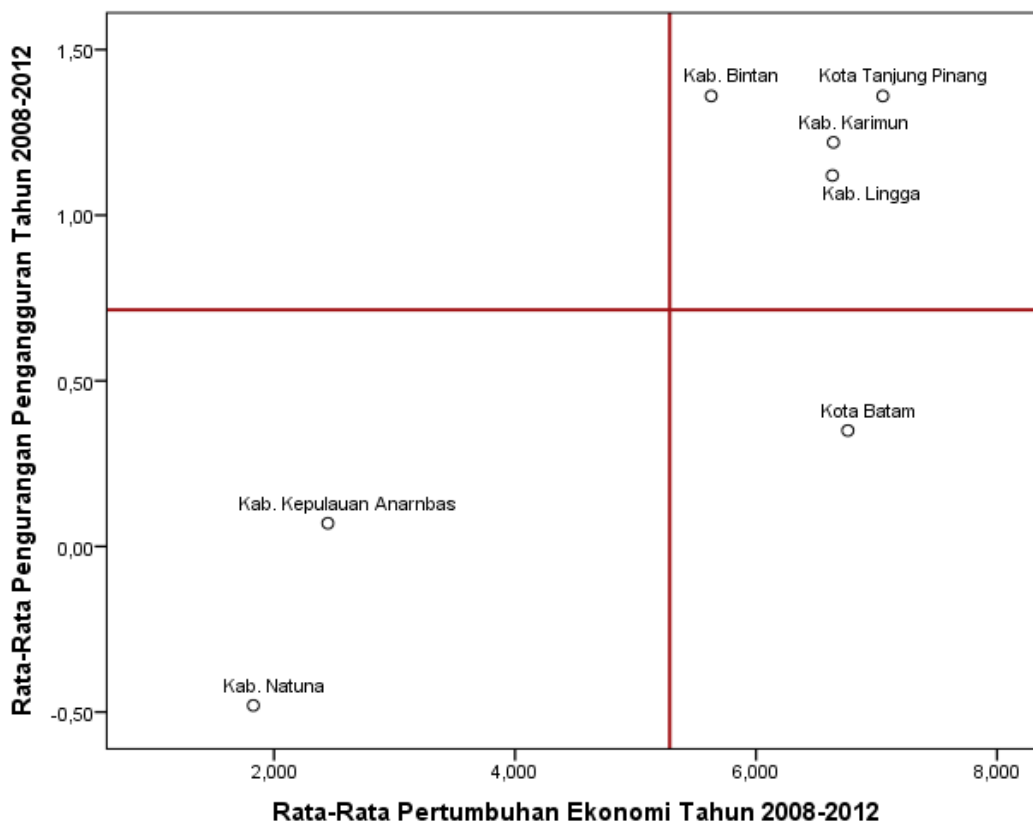
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seringkali dipahami sebagai peningkatan nilai tambah yang diikuti oleh perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 5).

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan
Jumlah Pengangguran 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, dan Kota Tanjung Pinang termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa

pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, tidak ada kabupaten dan kota yang terletak di kuadran II dengan kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). *Ketiga*, Kabupaten Natua dan Kepulauan Anambas yang terletak di kuadran III, memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kota Batam terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

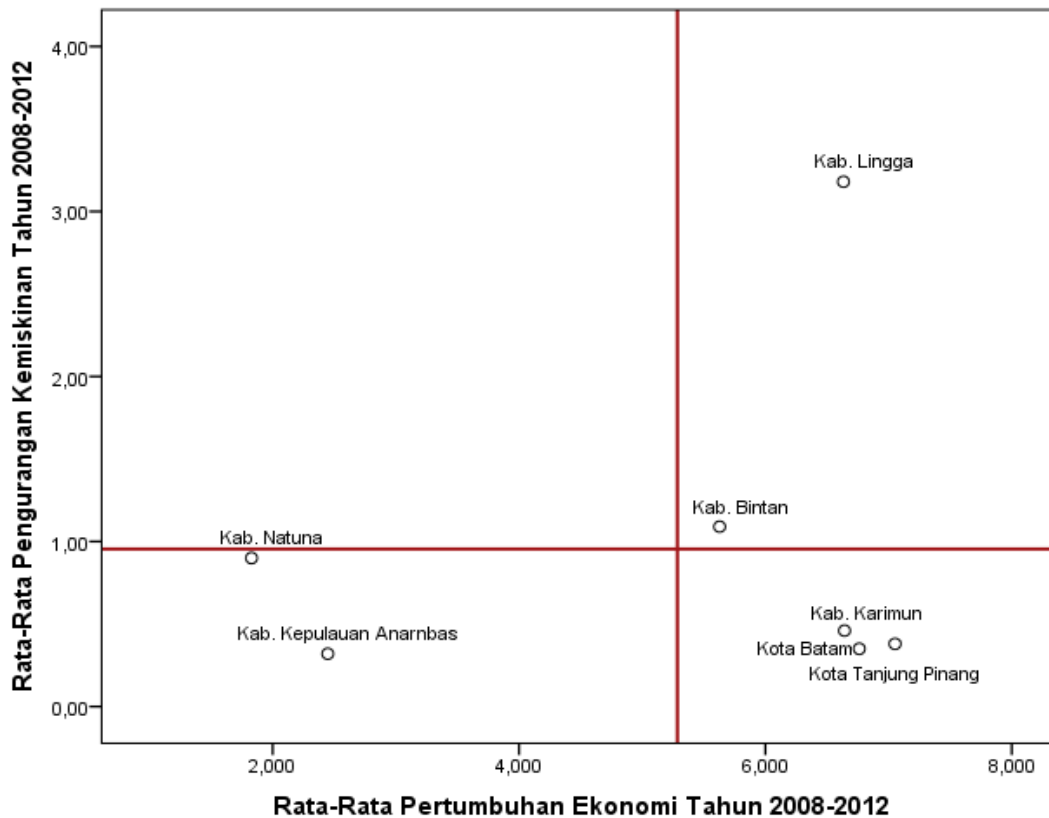
Gambar 6 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama tahun 2008 - 2012 dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Lingga dan Bintan termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, tidak ada kabupaten dan kota yang terletak di kuadran II dengan kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Kepulauan Amanbas terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut

menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Distribusi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 7).

Gambar 7

Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Kepulauan Amanbas dan Natuna yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan

produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, tidak ada kabupaten dan kota terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

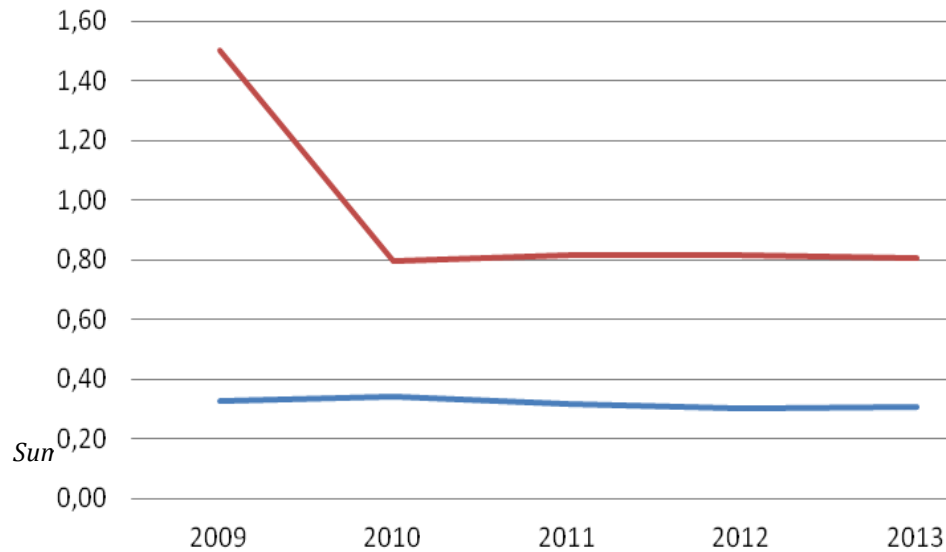
Keempat, Kabupaten Lingga, Karimun, dan Kota Batam terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2007-2012 tergolong rendah. Kesenjangan ekonomi di Kepulauan Riau masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Penyebab kesenjangan di Kepulauan Riau adalah distribusi sumber daya alam yang tidak merata. Beberapa daerah memiliki potensi sumber daya alam besar, sementara daerah lainnya hanya bergantung pada sektor primer dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau cukup tinggi walaupun distribusi pendapatannya kurang merata di seluruh kabupaten/ kota di provinsi ini, terlihat dari terdapatnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Pendapatan per kapita tertinggi di Kepulauan Riau adalah di Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Kota Batam sebagai kawasan perbatasan memiliki tingkat pendapatan perkapita tertinggi di Indonesia, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas memiliki pendapatan perkapita tinggi karena jumlah penduduknya yang sangat sedikit. Kota Batam menjadi kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas sehingga menjadi sasaran kedatangan pencari kerja. Kabupaten Natuna berpotensi untuk meningkatkan kemakmuran di daerahnya karena memiliki cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik. Dalam perut bumi masih terkandung minyak, terutama sumur off shore di bagian timur Natuna. Dari sisi migas, Natuna menyumbang kontribusi yang besar bagi perekonomian. Dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar, pendapatan per kapita di Natuna menjadi tinggi.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Perkiraan di Provinsi Kep. Riau 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Karimun	15.157	16.603	13.269	20.086	21.548	24.049
Kepulauan Riau	26.338	27.844	29.051	30.934	32.596	34.989
Natuna	59.464	64.223	57.525	59.663	60.329	64.847
Lingga	8.738	9.817	10.732	11.814	12.532	13.872
Kepulauan Anambas	-	-	68.995	72.032	70.546	71.745
Kota Batam	42.999	46.383	46.267	49.655	53.036	54.140
Kota Tanjung Pinang	19.927	22.634	24.882	27.503	29.252	31.679
Kepulauan Riau	35.485	68.276	39.774	42.359	45.467	49.644

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Struktur Perekonomian Berbasis Industri Namun Rentan Terhadap Krisis

Struktur perekonomian daerah secara sektoral dicirikan oleh besarnya peran sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan menyumbang hampir 50 persen dalam pembentukan output total (PDRB) tahun 2013 (Tabel 2). Industri pengolahan juga tumbuh signifikan sehingga menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan daerah bersumber dari pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	4,28	3,91
2.	Pertambangan	7,09	4,70
3.	Industri Pengolahan	47,70	50,00
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,58	0,55
5.	Konstruksi	8,35	5,25
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	20,09	24,11
7.	Angkutan, Telekomunikasi	4,46	4,55
8.	Keuangan	4,85	4,67
9.	Jasa-jasa	2,60	2,26
Total PDRB		100.00	100.00

Sumber: BPS, 2013

Besarnya peran sektor industri tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja daerah dalam sektor tersebut. Selama kurun waktu 2010-2014 perubahan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan tidak signifikan (Tabel 3). Penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan cukup besar, sejalan dengan kontribusinya yang tinggi dalam PDRB. Hal ini menandakan transformasi ekonomi daerah semakin ke arah perekonomian berubah dari sektor primer dan sekunder menjadi tersier.

Tabel 3
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014	Perubahan
1	Pertanian	88.439	117.978	29.539
2	Pertambangan	4.786	28.003	23.217
3	Industri Pengolahan	208.080	126.575	(81.505)
4	Listrik, Gas, Air	3.341	2.741	(600)
5	Bangunan	29.932	107.909	77.977
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	122.627	190.031	67.404
7	Angkutan & Telekomunikasi	42.557	51.525	8.968
8	Keuangan	18.227	35.093	16.866
9	Jasa-Jasa	135.023	185.233	50.210
Total		653.012	845.088	192.076

Sumber: BPS, 2014

Pergeseran tersebut juga menegaskan keunggulan komparatif perekonomian Kepulauan Riau di sektor-sektor modern. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai *Location Quotient* beberapa subsektor industri pengolahan yang relatif besar (lebih dari satu). Sektor-sektor basis daerah di antaranya industri barang kayu dan hasil hutan, industri kimia dan karet, industri logam dasar, dan industri permesinan (Tabel 4). Namun sektor industri pengolahan terlihat rentan dalam menghadapi dampak krisis. Selama tahun 2012 pertumbuhan industri pengolahan melambat bahkan terjadi pertumbuhan negatif di sektor-sektor industri tekstil, industri kertas dan barang

cetakan, industri kimia dan barang dari karet, dan industri logam dasar dan besi baja. Hal ini menegaskan bahwa daya saing industri masih harus ditingkatkan

Tabel 4
Nilai LQ Sektor Perekonomian Kepulauan Riau 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
a. Tanaman Bahan Makanan	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
b. Tanaman Perkebunan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
c. Peternakan	0,42	0,43	0,43	0,43	0,42
d. Kehutanan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
e. Perikanan	1,52	1,48	1,44	1,39	1,30
2. Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,66	0,63	0,63	0,65
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1,01	1,03	1,01	1,03	1,12
b. Pertambangan Bukan Migas	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19
c. Penggalian	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37
3. Industri Pengolahan	1,92	1,95	1,97	1,97	1,96
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	2,10	2,12	2,14	2,13	2,11
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,74	0,67	0,68	0,74	0,73
a. Listrik	0,43	0,43	0,47	0,50	0,48
b. Gas	1,92	1,37	1,33	1,55	1,58
c. Air Bersih	0,38	0,40	0,37	0,41	0,41
5. Konstruksi	0,66	0,70	0,73	0,75	0,77
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,28	1,33	1,33	1,30	1,31
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,28	1,35	1,33	1,29	1,29
b. Hotel	3,71	3,69	3,77	3,76	3,77
c. Restoran	0,56	0,54	0,57	0,60	0,62
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,55	0,51	0,47	0,47	0,45
a. Pengangkutan	1,06	1,07	1,05	1,07	1,07
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	1,29	1,28	1,27	1,32	1,31
3). Angkutan Laut	2,38	2,59	2,68	2,80	2,82
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5). Angkutan Udara	0,91	0,90	0,81	0,78	0,77
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33
b. Komunikasi	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49
a. Bank	0,79	0,82	0,81	0,80	0,80
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
e. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
9. Jasa-jasa	0,24	0,25	0,24	0,24	0,25
a. Pemerintahan Umum	0,26	0,28	0,28	0,29	0,30
b. Swasta	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,67	0,64	0,63	0,64	0,65
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19

LQ dihitung dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

2. Pertumbuhan Ekonomi Lebih Didorong Konsumsi daripada Investasi

Dari sisi penggunaan, pendorong utama pertumbuhan daerah adalah ekspor dan impor (Tabel 5). Nilai ekspor dan impor yang tinggi mengindikasikan aktivitas investasi lebih banyak berasal dari luar daerah, sedangkan investasi domestik relatif belum berkembang. Ke depan perlu didorong peningkatan investasi untuk menjamin pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi memerlukan penambahan stok kapital untuk menunjang produksi di sektor riil.

Tabel 5
Struktur PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	77,41	50,45
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,12	0,87
3.	Konsumsi Pemerintah	6,99	4,26
4.	PMTB	80,58	35,01
5.	Perubahan Stok	-77,28	-18,99
6.	Ekspor	111,10	93,70
7.	Impor	99,91	65,30
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan iklim usaha di daerah yang kondusif bagi investasi. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3. Kondisi Infrastruktur Wilayah Kurang Memadai untuk Mendukung Logistik yang Efisien

Salah satu penghambat penguatan daya saing perekonomian daerah adalah kondisi infrastruktur wilayah. Defisiensi infrastruktur baik secara kuantitas maupun kualitas akan menghambat distribusi barang secara efisien, yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kerapatan jalan wilayah, yaitu ukuran yang merupakan rasio antara panjang jalan dan luas wilayah di Kepulauan Riau lebih berada pada peringkat 11 secara nasional (Tabel 6)

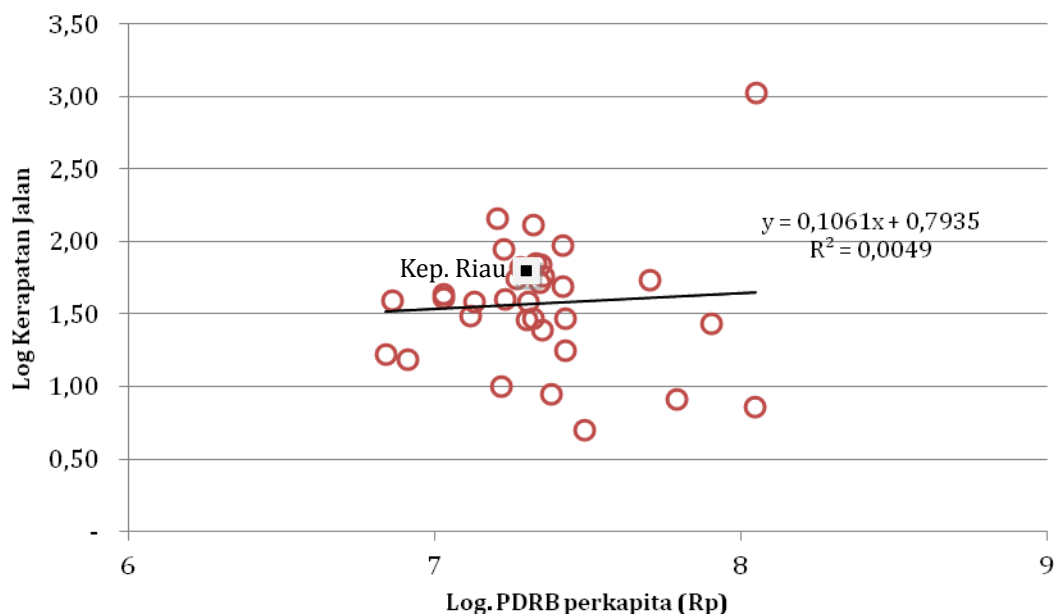
Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Untuk mengetahui tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dilakukan dengan membandingkan kerapatan jalan dengan tingkat pendapatan per kapita seluruh provinsi di Indonesia. Dari hasil regresi 33 provinsi diperoleh gambaran bahwa untuk sebuah perekonomian dengan tingkat pendapatan seperti Kepulauan Riau masih di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan secara kuantitas jaringan jalan wilayah relatif cukup namun perlu ditingkatkan untuk mendukung industrialisasi

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Jika dilihat dari kondisinya sekitar 50 persen jaringan jalan di Kepulauan Riau berada dalam kondisi rusak. Kondisi jaringan jalan semacam ini akan mengakibatkan bertambahnya waktu tempuh distribusi barang, mempercepat kerusakan armada transportasi, dan meningkatkan risiko kerusakan komoditas selama pengiriman, dan sebagai akibatnya biaya distribusi menjadi tinggi.

Tabel 7
Jalan Menurut Jenis Permukaan 2012

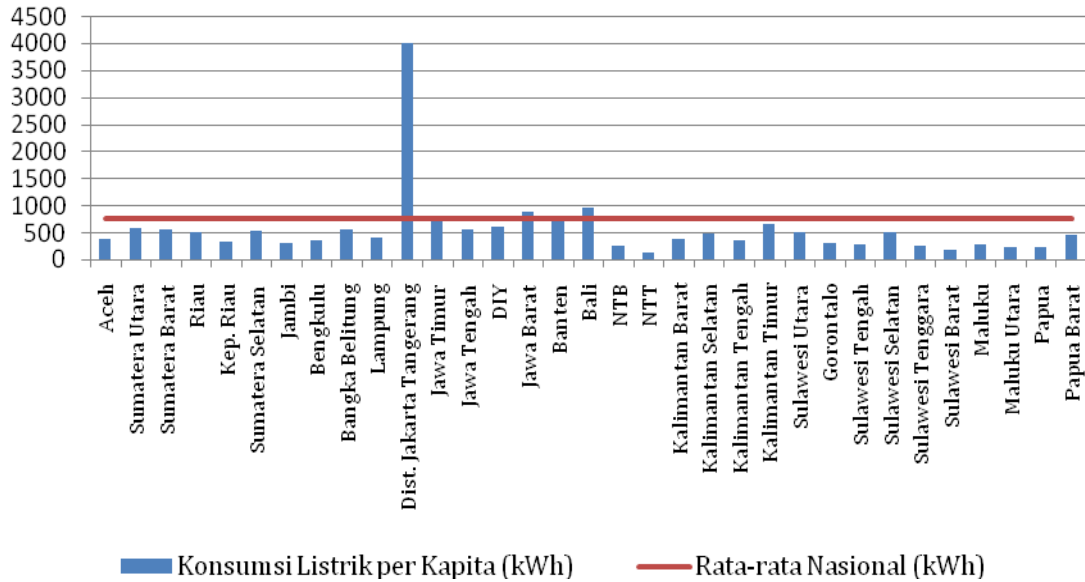
PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya		Km	%
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%		
Kepulauan Riau	737	24	1.180	39	1.034	34	78	3	3.029	100
Sumatera	74.399	50	30.509	20	39.739	27	5.258	4	149.905	100
INDONESIA	258.743	59	72.934	17	91.444	21	14.638	3	437.759	100

Sumber: BPS, 2013

Infrastruktur penting lainnya yang terkait erat dengan industrialisasi adalah listrik. Jika dilihat dari tingkat konsumsi listrik per kapita, kondisi di Kepulauan Riau

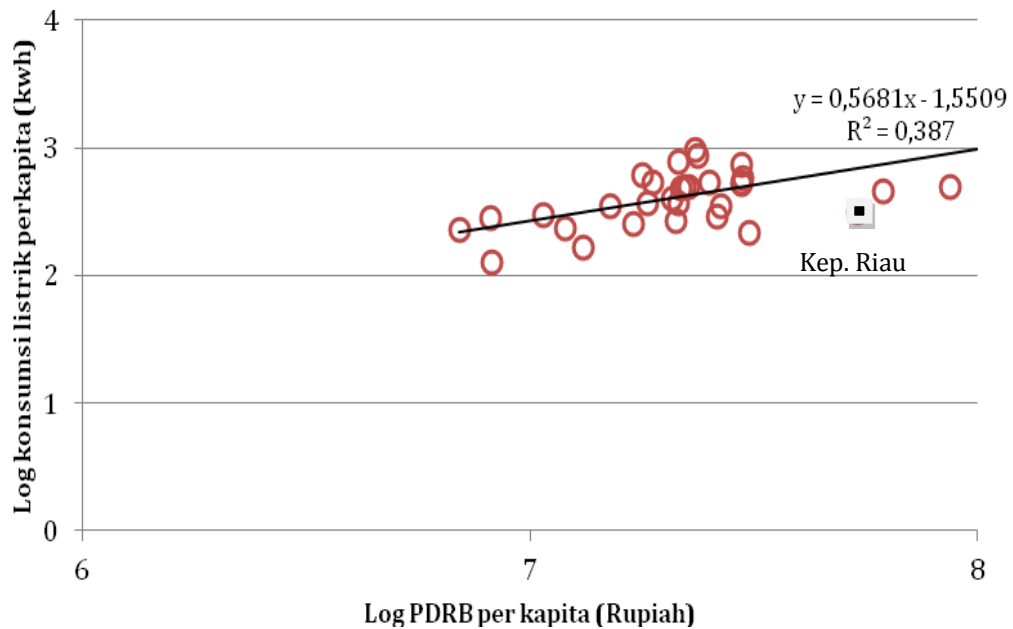
termasuk rendah dan berada di bawah angka rata-rata nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11).

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



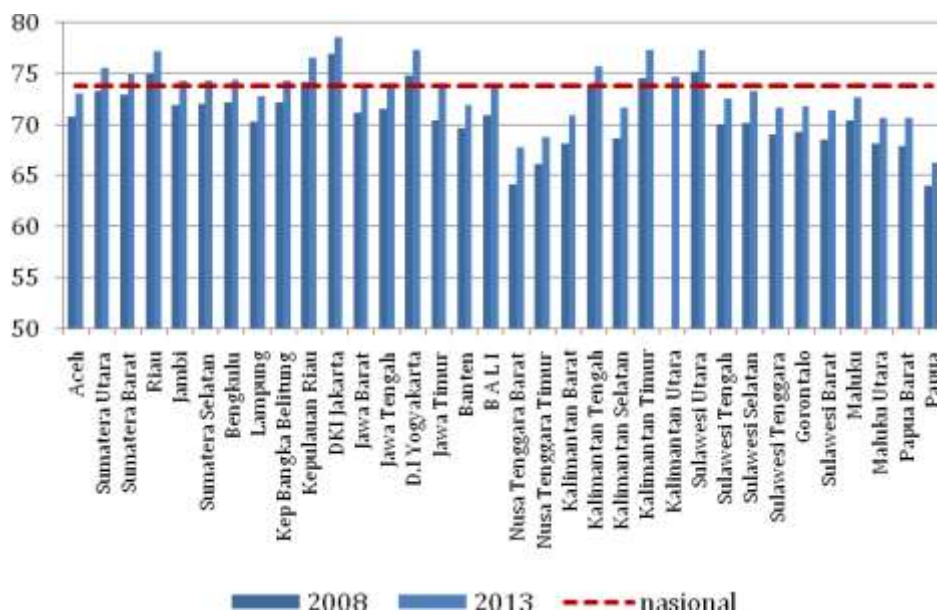
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) – diolah

Pada hubungan antara pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi listrik perkapita untuk mengetahui defisiensi infrastruktur listrik, di antara 33 provinsi di Indonesia konsumsi listrik per kapita di Kepulauan Riau juga tertinggal atau lebih rendah dari yang seharusnya (Gambar 12). Provinsi yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula. Posisi Kepulauan Riau berada di bawah kurva linier, menunjukkan konsumsi listrik Kepulauan Riau jauh lebih rendah dari di provinsi lainnya. Mengingat pentingnya suplai listrik bagi sektor industri, hal ini menunjukkan listrik menjadi faktor kritis bagi pertumbuhan wilayah

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor kualitas sumber daya manusia tidak bisa diabaikan dalam percepatan pertumbuhan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu transmisi kemajuan teknologi dalam suatu perekonomian. Kemajuan teknologi inilah yang menjadi penentu keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

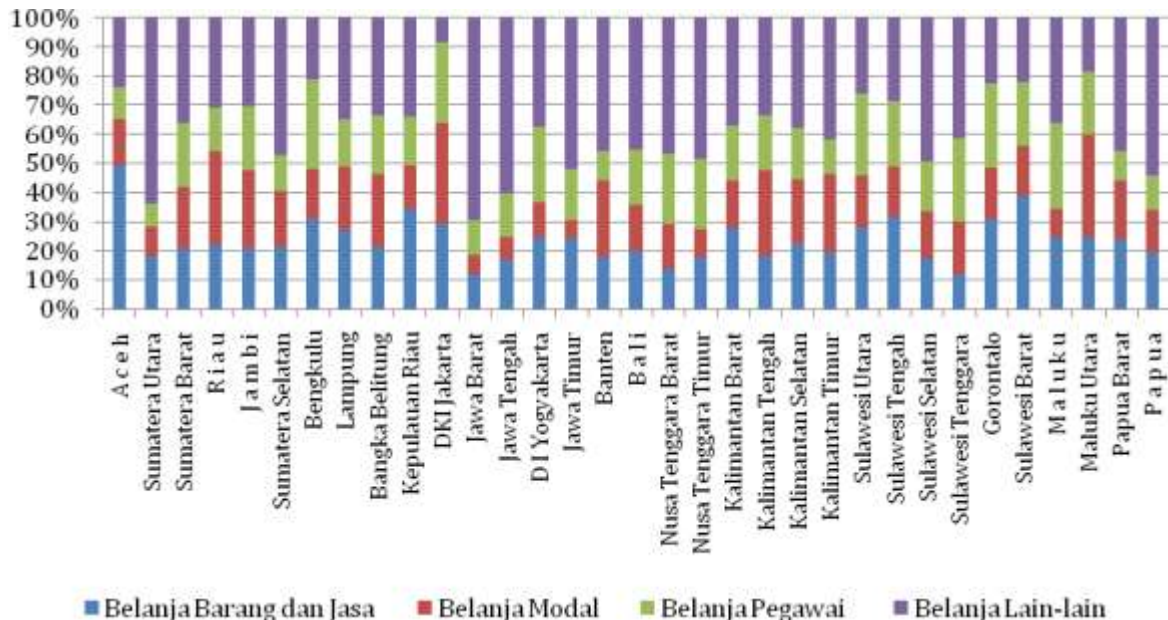
Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian pembangunan sumber daya manusia Kepulauan Riau cukup baik. Angka IPM pada tahun 2013 merupakan peringkat enam nasional, mencapai

angka 76,56 dan berada di atas angka nasional 73,81. (Gambar 13). Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 69,70 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,97 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Kepulauan Riau meningkat dari 8,94 tahun pada 2008 menjadi 9,91 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Kepulauan Riau pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 96 menjadi 98,07 persen, lebih tinggi dari capaian nasional 94,14 persen. Agar pembangunan sumber daya manusia di Kepulauan Riau dapat merata dinikmati seluruh masyarakat perlu adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan akses pendidikan di wilayah kepulauan terdepan dan perbatasan.

4. Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Masih Bisa Ditingkatkan untuk Mendukung Pertumbuhan

Terbatasnya kualitas infrastruktur wilayah menuntut peran pemerintah dalam pembiayaan prasarana publik. Dalam hal ini, porsi belanja modal dalam APBD (seluruh kabupaten/kota dan provinsi) relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain. Namun demikian porsi belanja modal ini masih relatif kecil bila dibandingkan dengan porsi belanja pegawai dan belanja barang. Pada tahun 2013, porsi belanja modal dan belanja pegawai di Kepulauan Riau masing-masing mencapai sekitar 14,98 persen dan 16,71 persen dari total belanja (Gambar 14).

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

Postur belanja APBD ini masih kurang responsif terhadap kebutuhan riil percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur wilayah merupakan salah satu kunci utama daya saing dan daya tarik daerah. Tanpa dukungan infrastruktur

yang baik, sulit diharapkan terealisasinya potensi investasi yang besar di Kepulauan Riau, baik yang berasal dari domestik (dalam daerah) maupun dari luar.

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Dengan potensi yang dimilikinya serta perkiraan dinamika lingkungan yang mempengaruhi, perekonomian Kepulauan Riau diperkirakan akan tumbuh positif hingga tahun 2015. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi sumber pertumbuhan, namun peran investasi diperkirakan akan meningkat. Membaiknya kualitas infrastruktur diperkirakan akan diikuti meningkatnya minat investor dalam mengembangkan industri pengolahan. Sementara itu ekspor akan menghadapi tantangan berat terkait pelambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju.

Berdasarkan kinerja pembangunan serta modal pembangunan yang dimiliki, prospek Kepulauan Riau dalam mencapai target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,7 – 7,5 persen dapat tercapai bila potensi daerah bisa dioptimalkan. Pada tahun 2014 perekonomian Kepulauan Riau tumbuh membaik terutama bersumber dari meningkatnya kinerja investasi baik pemerintah maupun swasta seiring dengan meningkatnya iklim usaha, yang sejalan dengan terbentuknya pemerintahan baru. Beberapa investasi swasta yang berjalan adalah investasi industri besi baja sebagai pendukung industri migas di Kepulauan Riau. Peningkatan investasi juga ditopang oleh aktivitas pemerintah yang meningkat tahun 2015.
2. Seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan tingkat kemiskinan daerah akan menurun. Namun demikian untuk dapat mencapai target penurunan kemiskinan RPJMN 2015-2019 hingga kisaran 5,1 – 3,4 persen diperlukan upaya lebih keras. Kondisi terakhir kemiskinan di Kepulauan Riau tahun 2013 berada di angka 6,46 persen. Untuk mencapai target RPJMN setidaknya diperlukan penurunan kemiskinan sebesar 3,06 poin persentase selama kurun waktu 2014-2019 atau sebesar 0,51 poin persentase per tahun. Peluang untuk mempercepat penurunan kemiskinan masih terbuka bila dilakukan pembenahan pada industri padat karya dan pertanian, dua lapangan usaha di mana konsentrasi penduduk miskin umumnya berada. Di sisi lain, tantangan berat bagi penurunan kemiskinan daerah adalah dampak dari kenaikan harga BBM (pengurangan subsidi BBM) yang cepat atau lambat akan terjadi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan koordinasi horisontal dan vertikal untuk mengantisipasi kemungkinan hal ini terjadi, terutama menyiapkan jaring-jaring pengaman untuk memperkecil dampak yang diterima penduduk miskin dan hampir miskin.

E. Penutup

1. Isu Strategis

Dari analisis di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu tersebut adalah permasalahan yang bila ditangani akan berdampak besar pada pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan daerah. Sebaliknya bila permasalahan tersebut diabaikan, maka berpotensi menimbulkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan lainnya. Isu-isu strategis tersebut adalah:

- a. Peningkatan daya saing industri
- b. Peningkatan iklim investasi
- c. Pembangunan infrastruktur wilayah
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- e. Peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah

2. Rekomendasi kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan proses perijinan usaha dengan mengurangi waktu dan besarnya biaya yang diperlukan.
- b. Pemantapan dan pemeliharaan jaringan jalan wilayah.
- c. Peningkatan kapasitas produksi listrik wilayah.
- d. Peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan vokasional.
- e. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah untuk infrastruktur daerah.

